



Judul : RUU TPKS dibawa ke paripurna
Tanggal : Kamis, 07 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

K I L A S

RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Rabu (6/4). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

"Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini bisa kita setuju untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat dua?" tanya Ketua Baleg Supratman Andi Agtas yang dijawab setuju oleh anggota Baleg dan pemerintah.

Sebanyak delapan fraksi menyatakan setuju dalam pengambilan keputusan tingkat I RUU TPKS. Anggota Baleg Fraksi PDIP DPR MY Esti Wijayati mengapresiasi hadirnya payung hukum yang melindungi dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

RUU TPKS disebut telah mengakomodasi berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. "Termasuk penghapusan atau pemutusan akses informasi elektronik yang mengandung muatan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga, diharapkan dapat memenuhi pemenuhan hukum serta perkembangan masyarakat saat ini," ujar My Esti.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya pihak yang menolak pengambilan keputusan tingkat I RUU TPKS. Pasalnya, dalam RUU TPKS tidak memuat aturan mengenai pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual atau LGBT. "Kami Fraksi PKS menolak RUU TPKS untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar anggota Baleg Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf.

■ nawir arsyad akbar ed: ilham tirta